

PAJAK EKSPOR, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PENDAPATAN: KASUS AGROINDUSTRI DI INDONESIA

Lestari Agusalim
Universitas Trilogi
lestariagusalim@gmail.com

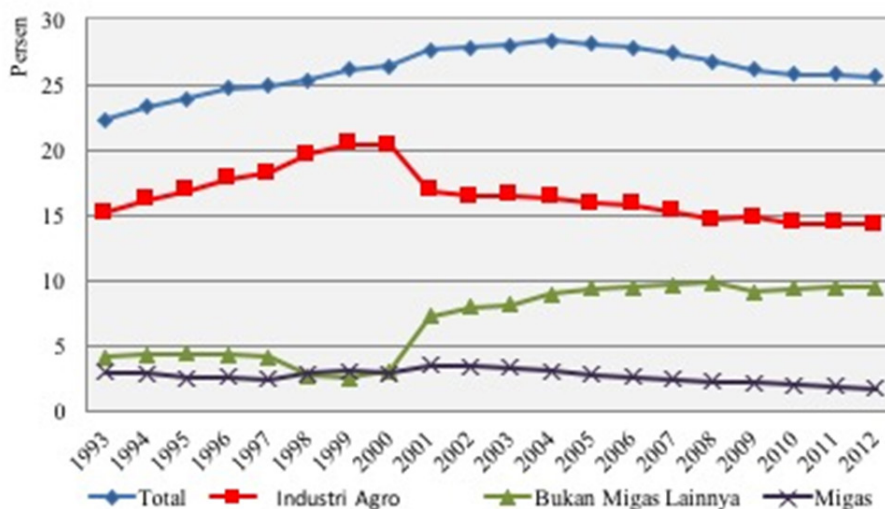
Abstract

This research aims to analyze whether export tax policy and the policy of productivity increment of agro industry based upstream and downstream sectors can increase real GDP growth, agro industry output, and household income. The model used in this research is a comparative static Computable General Equilibrium (CGE) model. The data used are from the 2008 Input-Output Table, the 2008 System Accounting Matrix (SAM) Table, and other relevant supporting sources. The three simulations conducted in this research are: (1) export tax policy on agro industry's upstream sector (SIM1), (2) export tax and productivity increment policies on agro industry's upstream sector (SIM2), and (3) export tax and productivity increment policies on agro industry's upstream and downstream sectors (SIM3). The three simulations will be adjusted to the government's policies to support agro industries' downstream. SIM1 has negative effect on real GDP and only increases agro industry output in certain sectors only. SIM2 and SIM3 have positive effect on real GDP and increases agro industry output. All simulations increase non-agricultural household incomes, and decrease agricultural household incomes.

Keywords: agroindustry, export tax, real GDP, household income

1. PENDAHULUAN

Perindustrian nasional diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Tujuan jangka panjang penerbitan peraturan tersebut adalah untuk membangun industri dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Pola perubahan struktur ekonomi Indonesia sejalan dengan kecenderungan proses transformasi struktural yang terjadi di berbagai negara, di mana terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian, sementara kontribusi sektor industri dan lainnya cenderung meningkat. Pada Gambar 1, dapat diketahui bahwa penyumbang terbesar sektor industri adalah sektor industri agro, kemudian disusul industri bukan migas lainnya, dan sektor migas. Meskipun kontribusi subsektor industri agro masih tertinggi tetapi kontribusinya terhadap PBD setiap tahunnya terus menurun sejak tahun 1999.



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Gambar 1.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB

Penurunan pangsa agroindustri terhadap PDB disebabkan oleh kurangnya ketersediaan bahan baku untuk kebutuhan domestik, di mana sebagian besar bahan baku masih diekspor dalam bentuk primer (Wachjudi, 2010). Fakta ini sangat memprihatinkan. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, sektor pertanian seharusnya mampu menyediakan bahan baku bagi industri agro.

Secara domestik, dalam lima tahun terakhir kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDB berkisar antara 12-14 persen tetapi memiliki kecenderungan menurun setiap tahun. Neraca perdagangan komoditas pertanian pada tahun 2012 mengalami surplus sebesar 20.412,8 juta dolar, tetapi hanya satu subsektor yang berkontribusi besar terhadap perdagangan sektor pertanian, yaitu subsektor perkebunan dengan surplus perdagangan sebesar 30.021,52 juta dolar. Subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan justru mengalami defisit perdagangan dengan nilai masing-masing 6.156,19 juta dolar, 1.310,96 juta dolar, dan 2.141,57 juta dolar. Komoditas ekspor utama subsektor perkebunan terdiri atas kelapa sawit (CPO), karet, kopi, kelapa, kakao, dan teh. Sedangkan impor terbesar subsektor perkebunan, yaitu tembakau, kakao, kopi, karet, gula tebu, dan teh. Impor terbesar untuk subsektor tanaman pangan adalah gandum, kapas, kedele, beras, dan ubi kayu. Impor tanaman hortikultura didominasi oleh jeruk, dan apel, bawang. Impor utama subsektor peternakan terdiri dari susu, kulit, dan mentega (Kementan, 2013).

Selain permasalahan ketersediaan bahan baku, terdapat permasalahan lain dalam meningkatkan pertumbuhan agroindustri, yaitu terjadinya stagnasi produktivitas sektor pertanian, khususnya sektor perkebunan di mana rata-rata produktivitas sektor tersebut hanya sebesar 1,59 ton/ha sepanjang tahun 2008-2012. Hal ini disebabkan beragam faktor, antara lain; (1) keterbatasan alamiah (tanaman tua), (2) keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi karena lemahnya jejaring lembaga riset antara petani dan pelaku usaha, (3)

keterbatasan akses ke sumber pendanaan, (4) kelemahan dalam organisasi produksi, (5) gangguan keamanan dalam berusaha, (6) belum adanya kepastian hukum, dan (7) prasarana dan sarana yang minim (Kementan, 2013).

Kementerian Perindustrian melalui kebijakan strategi percepatan dan perluasan agroindustri berupaya mendorong pembangunan infrastruktur pendukung yang sejalan dengan program *Masterplan* Perluasan dan Percepatan Pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI). Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah adalah memberikan disinsentif berupa bea keluar kepada barang mentah yang diekspor. Kebijakan pajak ekspor dinilai sebagai salah satu opsi kebijakan yang sangat efektif untuk mengontrol ekspor bahan baku agroindustri. Sebagai contoh, pemerintah Ghana sebagai salah satu penghasil kakao dunia sejak tahun 2009 menetapkan bahwa 60 persen dari produksi kakao harus diolah di dalam negeri dan menerapkan pajak ekspor biji kakao. Pendapatan dari pajak ekspor tersebut kemudian dikembalikan kepada petani untuk mendukung kegiatan mereka. Dampak lain dari kebijakan tersebut adalah investor datang sendiri ke Ghana (Kemenperin, 2011). Di Indonesia, untuk mencegah kekurangan ketersediaan bahan baku, pemerintah pernah melakukan kebijakan peningkatan pajak ekspor CPO dari 5 persen pada bulan Januari menjadi 40 persen pada bulan April dan 60 persen pada bulan Juli dalam tahun 1998. Penetapan pajak ini disesuaikan dengan perubahan harga dunia saat itu. Salah satu tujuan diterapkan pajak ekspor adalah untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga minyak goreng domestik. Setelah pasokan CPO mulai stabil untuk memasok industri minyak goreng domestik dan harga minyak goreng mulai turun, pemerintah kembali menurunkan pajak ekspor secara bertahap (Munadi, 2007).

Kendala lain dalam mengembangkan industri agro adalahnya rendahnya produktivitas di sektor hulunya, yaitu sektor pertanian. Pemerintah melalui rencana strategisnya mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian agar dapat menunjang percepatan pertumbuhan agroindustri. Haryono (2008) dalam risetnya menyimpulkan bahwa apabila terjadi peningkatan produktivitas sektor pertanian, maka dapat berdampak positif terhadap peningkatan output industri agro.

Berdasarkan ulasan di atas, kebijakan pajak ekspor dan peningkatan produktivitas sektor pertanian dinilai mampu menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong berkembangnya industri agro. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam apakah kebijakan tersebut mampu mendorong hilirisasi industri agro, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2010-2014. Secara ringkas tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis dampak penerapan pajak ekspor komoditas ekspor utama terhadap ekonomi makro, sektoral, dan distribusi pendapatan rumah tangga di Indonesia.
2. Menganalisis dampak penerapan pajak ekspor dan peningkatan produktivitas sektor hulu komoditas ekspor utama terhadap ekonomi makro, sektoral, dan distribusi pendapatan rumah tangga di Indonesia.
3. Menganalisis dampak penerapan pajak ekspor dan peningkatan produktivitas sektor hulu dan hilir komoditas ekspor utama terhadap ekonomi makro, sektoral, dan distribusi pendapatan rumah tangga di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

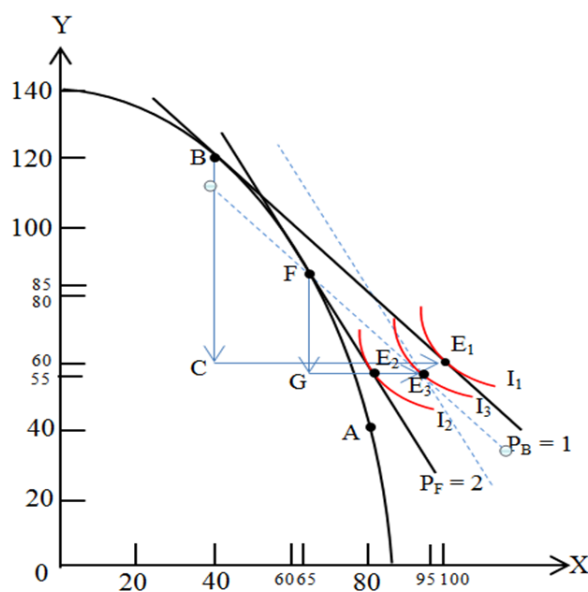
2.1. Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan internasional didorong oleh adanya perbedaan harga antar negara (Nopirin, 1997). Faktor utama yang menjadi alasan negara-negara melakukan perdagangan internasional adalah adanya perbedaan sumber daya antarnegara dan setiap negara

bertujuan mencapai skala ekonomis dalam produksinya (Krugman dan Obstfeld, 2002). Perbedaan antar negara yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah perbedaan sumberdaya alam, sumberdaya modal, tenaga kerja dan teknologi yang mengakibatkan perbedaan efisiensi produksi antar negara (Halwani, 2002).

Pajak Ekspor

Berikut adalah ilustrasi dampak keseimbangan umum dari diberlakukannya pajak ekspor di negara kecil. Negara kecil adalah negara yang tidak mampu mengendalikan harga internasional, yang biasa disebut sebagai *price taker*. Pada Gambar 3, negara berada dalam kondisi equilibrium (dalam kondisi autarki, dimana perdagangan sama sekali belum terjadi) di titik A. Jika negara terlibat dalam perdagangan bebas atas dasar harga relatif $P_B = P_x/P_y = 1$, maka negara akan mengubah tingkat produksinya di titik B. Di titik tersebut ia akan mempertukarkan 60 unit komoditi Y untuk 60 unit komoditi X dari negara lain. Dan ia akan mencapai konsumsi di titik E_1 , yang terletak pada kurva I_1 . Ketika pemerintah memberlakukan pajak ekspor pada komoditi Y sebesar 100 persen, dimana harga relatif berubah menjadi $P_F = P_x/P_y = 2$, padahal harga dipasar dunia tidak berubah ($P_x/P_y=1$), sehingga secara relatif produsen membutuhkan *oportunity cost* yang tinggi untuk untuk memproduksi komoditi Y. Sebagai akibat adanya pajak ekspor maka produsen domestik akan berproduksi di titik F. Di titik tersebut ia akan menukarkan 30 unit komoditi Y untuk memperoleh 30 unit komoditi X dari negara lain sehingga ia akan mengadakan konsumsi di titik E_2 , yang terletak pada kurva I_2 . Harus diingat, kenaikan *oportunity cost* tersebut dikompensasi dengan adanya pemasukan pajak pemerintah.



Sumber: Salvatore, 1997

Gambar 2.

Dampak keseimbangan umum pemberlakuan pajak ekspor

Penerimaan pemerintah tersebut kemudian didistribusikan dalam bentuk konsumsi publik, sehingga dampak akhir dari diberlakukan pajak adalah produsen tetap memproduksi dititik F tetapi tingkat konsumsi bergeser ke titik E_3 yang terletak pada kurva I_3 . Kurva I_3 terletak pada perpotongan diantara dua garis putus-putus (yang sama dengan sudut yang terbentuk oleh kedua garis harga $P_B = 1$ dan $P_F = 2$) itu sama dengan pajak ekspor 100 persen. Dengan bergesernya produksi negara kecil dari titik F dan konsumsi di titik E_3 akibat pemberlakuan pajak ekspor tersebut, maka negara kecil akan mengekspor 30Y dan mengimpor 30X. Ini jelas merupakan suatu kemerosotan karena dimasa sebelumnya, dalam kondisi perdagangan bebas, negara kecil mengekspor 60Y dan mengimpor 60X.

Helpman dan Krugman (1985) membenarkan ilustrasi di atas dengan pemaparan mereka bahwa kebijakan pajak ekspor pada suatu negara yang tidak memiliki kekuatan pasar akan memperburuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional. Karena itu, apabila terjadi peningkatan perdagangan, hal tersebut akan diikuti dengan peningkatan harga ekspor. Sebaliknya, pelaksanaan pajak ekspor oleh negara yang memiliki kekuatan pasar lebih efektif dalam mempengaruhi harga internasional, volume perdagangan, dan distribusi pendapatan.

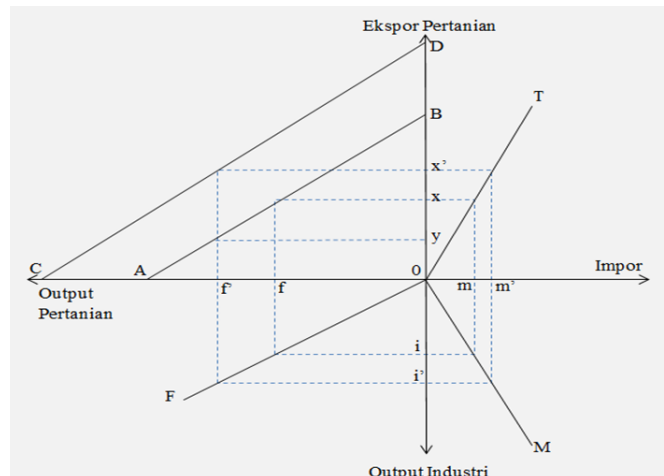
2.2. Teori Industri

BPS (2004) menjelaskan bahwa industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Agroindustri adalah cabang industri bukan migas yang terdiri dari industri makanan, minuman dan tembakau, Industri tekstil, barang kulit dan alas kaki, Industri barang kayu dan hasil hutan lain, Industri barang kertas dan barang cetakan, dan Industri pupuk, kimia dan barang dari karet.

Hasibuan (1993) menyebutkan industri memiliki dua cakupan pengertian, yaitu mikro dan makro. Secara mikro, industri adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang homogen, atau barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti yang erat. Pengertian industri secara makro dari segi pembentukan pendapatan adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah, yakni semua produk, baik barang maupun jasa.

Keterkaitan Sektor Pertanian dan Industri

Secara grafis, keterkaitan antara sektor pertanian dan sektor industri disajikan pada Gambar 3. Jumlah output dari sektor pertanian adalah OA , sedangkan Of adalah makanan yang dikonsumsi di pasar domestik dan Ox adalah bahan baku atau komoditas pertanian yang diekspor. Ekspor ini memungkinkan negara yang bersangkutan untuk impor sebesar Om , dengan dasar tukar internasional (*terms of trade*) OT . Dengan adanya impor (Om) dan makanan (Of) memungkinkan sektor industri di negara tersebut dapat menghasilkan output sebesar Oi . Misalkan volume produksi di sektor industri meningkat ke Of' . Untuk tujuan ini dibutuhkan lebih banyak input yang harus diimpor, yakni sebesar Om' . Produksi meningkat berarti juga kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat di negara tersebut juga meningkat, yang selanjutnya berarti permintaan akan makanan juga meningkat, yakni ke Of' . Jika output di sektor pertanian tidak meningkat, maka ekspor dari sektor tersebut akan berkurang ke Oy dan ini berarti kebutuhan akan impor sebesar Om' tidak dapat dipenuhi. Oleh sebab itu, dalam usaha meningkatkan volume produksi di sektor industri (ke Oi'), maka output di sektor pertanian juga harus ditingkatkan ke OC . Ini akan meningkatkan konsumsi makanan ke Om' dan berarti juga output di sektor industri bisa naik ke Oi' .



Sumber: Tambunan (2001)

Gambar 3.
Keterkaitan Sektor Pertanian dan Sektor Industri

Penjelasan ilustrasi pada Gambar 3 memberikan informasi bahwa peningkatan output sektor industri pertanian sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor pertanian. Oleh karena itu, sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam proses industrialisasi pertanian.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Analisis

Permasalahan di atas akan dianalisis menggunakan model CGE *comparative static* yang merupakan kombinasi dan pengembangan dari model dasar ORANI-F (Horridge *et al.*, 1993), INDOF (Oktaviani, 2000), dan WAYANG (Wittwer, 1999). Model ini dijalankan menggunakan program GEMPACK. Data utama yang digunakan terdiri atas data Tabel Input-Output (I-O) tingkat nasional tahun 2008, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) tahun 2008, serta data penunjang lainnya. Sistem persamaan dalam model ini terdiri dari 14 blok persamaan, diantaranya: (1) permintaan untuk tenaga kerja, (2) permintaan untuk input primer, (3) permintaan untuk input antara, (4) permintaan gabungan input primer dan input antara, (5) gabungan komoditi dari output industri, (6) Permintaan untuk barang-barang investasi, (7) permintaan rumah tangga, (8) ekspor dan permintaan akhir lainnya, (9) permintaan margin, (10) harga ditingkat pembeli, (11) kondisi *market clearing*, (12) pajak tidak langsung, (13) PDB dari sisi pendapatan dan pengeluaran, dan (14) kesimbangan perdagangan dan persamaan agregasi lainnya.

3.2. Agregasi dan Disagregasi

Sektor ekonomi dalam penelitian ini dilakukan agregasi dan disagregasi sehingga menjadi 35 sektor ekonomi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Sektor pertanian yang diteliti terdiri atas 14 sektor, yaitu padi, tanaman makanan lainnya, karet, tebu, kelapa sawit, tembakau, kopi, teh, kakao, tanaman perkebunan lainnya, peternakan, kayu, hasil hutan lainnya, dan perikanan. Sektor agroindustri yang akan diteliti terdiri atas 13 sektor, yaitu industri makanan, industri kelapa sawit (CPO), industri beras, industri terigu, industri

gula, industri rokok, industri pemintalan, industri tekstil, pakaian dan kulit, industri bambu, kayu dan rotan, industri kertas, barang dari kertas dan karbon, industri pupuk dan pestisida, serta industri pengolahan karet. Delapan sektor lainnya adalah sektor pertambangan, kimia, semen, industri lainnya, listrik, gas, dan air bersih, bangunan, perdagangan, restoran dan hotel, serta sektor jasa lainnya.

Dalam penelitian ini, rumah tangga dikategorikan dalam delapan kelompok mengikuti klasifikasi rumah tangga yang terdapat dalam SNSE 2008, yaitu (1) buruh pertanian, (2) pengusaha pertanian, (3) pengusaha bebas golongan rendah pertanian, (4) bukan angkatan kerja pedesaan, (5) pengusaha bebas golongan rendah pertanian (6) pengusaha bebas golongan rendah perkotaan, (7) bukan angkatan kerja perkotaan, dan (8) pengusaha bebas golongan atas perkotaan.

3.3. Simulasi Kebijakan

Simulasi kebijakan yang dilakukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 564/KM.4/2013. Peraturan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.OII/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Pengenaan pajak ekspor akan meningkatkan penerimaan pemerintah, tetapi menjadi biaya bagi pelaku ekonomi. Sementara itu, untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, pemerintah mengalokasikan anggaran sebagaimana yang termuat dalam rencana strategis Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan 2010-2014. *Shock* simulasi peningkatan produktivitas industri berbasis agro menggunakan nilai hasil perhitungan Haryono (2008). Perhitungan tersebut diperoleh melalui estimasi indeks *Total Factor Productivity* (TFP), yaitu mengukur rasio indeks output dan indeks input. Simulasi kebijakan yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.
Skenario simulasi kebijakan

| Kode Simulasi | Keterangan | Sektor | Besaran Shock (%) |
|---------------|--|---------------------------------|-------------------|
| SIM1 | Penaan pajak ekspor | Industri minyak dan lemak / CPO | 10,5 |
| | | Kakao | 5 |
| | | Kayu | 5 |
| SIM2 | Penaan pajak ekspor | Industri minyak dan lemak / CPO | 10,5 |
| | | Kakao | 5 |
| | | Kayu | 5 |
| | Peningkatan produktivitas pertanian | kelapa sawit | 10,36 |
| | | Kakao | 17,51 |
| | | Kayu | 1 |
| SIM3 | Penaan pajak ekspor | Industri minyak dan lemak / CPO | 10,5 |
| | | Kakao | 5 |
| | | Kayu | 5 |
| | Peningkatan produktivitas pertanian | kelapa sawit | 10,36 |
| | | Kakao | 17,51 |
| | | Kayu | 1 |
| | Peningkatan produktivitas industri berbasis Agro | Industri makanan | 1,4342 |
| | | Industri minyak dan lemak / CPO | 2,2022 |
| | | Industri bambu, kayu, dan rotan | 1,1106 |

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Dampak Ekonomi Makro

Dampak penaan pajak terhadap kinerja makroekonomi tercermin dari variabel-variabel yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Secara teoritis, PDB dapat dihitung dari dua sisi, yaitu dari sisi pengeluaran dan sisi pendapatan. Dari sisi pengeluaran, variabel makroekonomi yang digunakan meliputi konsumsi riil rumah tangga, investasi riil, konsumsi riil pemerintah, dan ekspor bersih (ekspor minus impor). Sedangkan dari sisi pendapatan, data makroekonomi yang digunakan terdiri dari pendapatan dari tingkat pengembalian modal (lahan dan kapital) serta upah gaji.

Secara rinci hasil simulasi kebijakan terhadap ekonomi makro dapat dilihat pada Tabel 2. Teori dampak keseimbangan umum pemberlakuan pajak ekspor menyatakan bahwa kebijakan pajak ekspor suatu negara yang tidak memiliki kekuatan pasar akan memperburuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional (Salvatore 1997). Hasil simulasi kebijakan pajak ekspor (SIM1) sejalan dengan teori tersebut dimana PDB riil mengalami penurunan sebesar 0,156 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan ekspor, konsumsi riil rumah tangga, investasi riil, pengeluaran riil pemerintah, dan ekspor, masing-masing sebesar 0,327 persen, 0,115 persen, 0,117 persen, dan 0,115 persen. Penurunan juga terjadi pada impor sebesar 0,156 persen yang disebabkan oleh penurunan konsumsi riil rumah tangga dan peningkatan devaluasi riil. Dari sisi penerimaan, PDB riil mengalami penurunan, hal ini dikarenakan walaupun upah riil mengalami peningkatan karena terjadi deflasi, tapi baik sewa barang modal, dan sewa lahan mengalami penurunan sehingga secara agregat mengakibatkan PDB riil turun.

Tabel 2.

Dampak kebijakan terhadap ekonomi makro (perubahan persentase)

| Peubah makroekonomi | SIM1 | SIM2 | SIM3 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| PDB riil sisi pengeluaran | -0,154 | 0,105 | 0,350 |
| Konsumsi riil rumah tangga | -0,115 | 0,051 | 0,262 |
| Investasi riil | -0,117 | 0,246 | 0,415 |
| Pengeluaran riil pemerintah | -0,115 | 0,051 | 0,262 |
| Indeks volume ekspor | -0,327 | 0,033 | 0,384 |
| Indeks volume impor | -0,156 | -0,01 | 0,150 |
| Inflasi/Indeks harga konsumen | -0,296 | -0,196 | -0,260 |
| Devaluasi riil | 0,277 | 0,206 | 0,281 |
| Upah riil rata-rata | 0,297 | 0,196 | 0,261 |
| Sewa barang modal | -0,568 | -0,018 | 0,148 |
| Sewa lahan | -1,761 | -2,311 | -2,028 |

Secara umum, hasil simulasi pertama (SIM1) memperlihatkan bahwa pengenaan pajak ekspor yang bertujuan untuk mendorong hilirisasi industri agro justru berdampak negatif terhadap variabel ekonomi makro. Sebagaimana pandangan ekonomi keynesian, ketika terjadi penurunan daya saing ekspor yang merupakan salah satu komponen dalam PDB akan menurunkan pendapatan nasional. Bila keberhasilan ekonomi nasional hanya dinilai berdasarkan indikator makroekonomi, maka kebijakan pada SIM1 dinilai tidak pro terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan menurunkan daya saing ekspor.

Pada Tabel 2 juga disajikan hasil simulasi kedua (SIM2), yaitu dampak kebijakan pajak ekspor disertai peningkatan produktivitas bagi komoditas pertanian utama terhadap variabel makroekonomi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berdampak positif terhadap PDB riil sisi pengeluaran, dimana terjadi peningkatan sebesar 0,105 persen. Pada simulasi ini peningkatan produktivitas dipadukan dengan pemberlakuan pajak ekspor ternyata akan meningkatkan PDB riil dibandingkan dengan SIM1. Pertumbuhan positif PDB riil didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga riil, investasi riil, pengeluaran riil pemerintah, dan ekspor meningkat masing-masing sebesar 0,051 persen, 0,246 persen, 0,051 persen, dan 0,033 persen. Dampak terhadap impor masih bernilai negatif tetapi relatif lebih kecil dibandingkan dengan SIM1.

Pada SIM2 kebijakan pajak ekspor yang disertai peningkatan produktivitas komoditas ekspor utama, secara implisit menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas mampu mereduksi dampak negatif pajak ekspor pada variabel makro ekonomi konsumsi riil rumah tangga, investasi riil, pengeluaran riil pemerintah, ekspor, dan impor. Secara umum hasil simulasi kedua (SIM2) memperlihatkan bahwa pengenaan pajak ekspor disertai peningkatan produktivitas pada komoditas pertanian utama yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sektoral, yakni industri agro berdampak positif terhadap variabel makroekonomi. Artinya, kebijakan SIM2 pro terhadap PDB dan meningkatkan daya saing ekspor.

Selain kedua simulasi di atas, dalam penelitian ini dilakukan simulasi ketiga (SIM3), yaitu menganalisis dampak kebijakan pajak ekspor dan peningkatan produktivitas sektor hulu dan hilir komoditas ekspor utama terhadap ekonomi makro. Kebijakan pada SIM3 berdampak positif terhadap PDB riil, yaitu terjadi peningkatan sebesar 0,350 persen. Perubahan tersebut relatif lebih besar dibandingkan dengan dua simulasi sebelumnya. Pertumbuhan PDB riil tersebut didorong oleh peningkatan dalam konsumsi riil rumah tangga, investasi riil, pengeluaran riil pemerintah, dan ekspor. Di sisi lain, impor mengalami peningkatan sebesar 0,150 persen. Peningkatan tersebut

disebabkan oleh peningkatan dalam konsumsi riil rumah tangga dan devaluasi riil. Dari sisi penerimaan, kenaikan PDB riil didorong oleh peningkatan sewa barang modal dan upah riil, masing-masing sebesar 0,148 persen dan 0,261 persen. Dibandingkan dengan SIM1 dan SIM2, kenaikan sewa barang modal pada SIM3 terjadi karena adanya peningkatan produktivitas industri hilir yang merupakan padat modal. Hasil simulasi ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Haryono (2008) yang menyatakan bahwa peningkatan produktivitas sektor pertanian yang diikuti oleh peningkatan produktivitas industri agro mampu mendorong seluruh industri memproduksi secara lebih efisien, sehingga mampu menghasilkan output yang harganya lebih murah. Penurunan tingkat harga produk domestik akan menurunkan tingkat harga produk ekspor. Penurunan harga produk ekspor ini selanjutnya akan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan oleh Indonesia di pasar internasional. Pada gilirannya produk-produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional, yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai devaluasi riil mata uang rupiah terhadap dollar.

Dari ketiga simulasi yang dilakukan, adanya kenaikan produktivitas input total menyebabkan efisiensi penggunaan input dalam proses produksi sehingga akan mendorong investor untuk meningkatkan investasi yang pada akhirnya akan mendorong kenaikan output nasional. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kebijakan peningkatan produktivitas sektor hulu dan hilir industri berbasis agro yang menyertai kebijakan pajak ekspor mendorong peningkatan pertumbuhan PDB riil.

4.2. Dampak terhadap Output Domestik Agroindustri

Tabel 3 memberikan informasi mengenai dampak kebijakan pajak ekspor dan peningkatan produktivitas sektor hulu dan hilir berbasis industri agro terhadap output domestik sektoral khususnya sektor industri agro. Secara teoritis kebijakan pajak ekspor akan meningkatkan biaya produksi bagi sektor yang dikenai pajak, sehingga menghambat produsen mengekspor komoditas yang dikenai pajak tersebut dan menjualnya di pasar domestik (Salvatore 1997). Hasil riset yang dilakukan oleh Purba (2012) menunjukkan bahwa pengenaan pajak ekspor CPO untuk bahan baku minyak goreng berpengaruh negatif terhadap ekspor CPO dan berdampak positif terhadap ketersediaan bahan baku untuk industri minyak goreng. Namun dalam penelitian ini, teori yang dikemukakan oleh Salvatore (1997) tidak sepenuhnya terbukti. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Purba (2012), sebagaimana diperlihatkan oleh simulasi pertama (SIM1) dimana kebijakan pajak ekspor CPO mengakibatkan penurunan output CPO domestik 0,104 persen. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas CPO tersebut tidak terserap di pasar domestik. Untuk diketahui, pangsa ekspor CPO mencapai 67 persen, sehingga hanya 33 persen digunakan dalam pasar domestik. Output domestik CPO turun karena selama ini minyak sawit lebih banyak diekspor dalam bentuk CPO dan belum mampu dilakukan beragam inovasi untuk membuat produk turunan dari minyak sawit tersebut. Hal ini dikarenakan penguasaan *research and development* produk hilir turunan CPO masih lemah (Kemenperin, 2009). Penelitian lainnya dilakukan oleh Panjaitan (2013) menyatakan bahwa minimnya hilirisasi CPO disebabkan oleh dukungan riset yang belum optimal dan lemahnya kebijakan instrumen fiskal yang dibutuhkan untuk mendorong kompetitif volume diversifikasi produk minyak sawit. Padahal, CPO memiliki potensi diversifikasi tinggi. Rekayasa kimia ataupun modifikasi fisika dapat memberikan beragam produk turunan sawit, baik peruntukan pangan maupun non pangan.

Tabel 3.

Dampak kebijakan terhadap output domestik sektoral (perubahan persentase)

| Sektor | SIM1 | SIM2 | SIM3 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Sektor pertanian | | | |
| Karet | 1,320 | 1,426 | 1,625 |
| Tebu | 0,339 | 0,463 | 0,456 |
| Kelapa sawit | -2,939 | 0,575 | 1,184 |
| Tembakau | 0,034 | 0,180 | 0,342 |
| Kopi | 0,252 | 0,401 | 0,151 |
| Teh | 0,392 | 0,533 | 0,309 |
| Kakao | 3,556 | 11,540 | 11,364 |
| Tanaman perkebunan lainnya | -0,374 | 0,204 | 0,401 |
| Kayu | 0,232 | 0,596 | 0,806 |
| Hasil hutan lainnya | 0,465 | 0,676 | 0,878 |
| Sektor industri Agro | | | |
| Makanan | 0,185 | 0,325 | 1,073 |
| Industri minyak and lemak / CPO | -0,104 | 2,685 | 3,102 |
| Bambu, kayu, and rotan | 0,100 | 0,338 | 0,673 |

Di sisi lain, sektor kakao dan kayu mengalami pertumbuhan output domestik, yakni sebesar 3,556 persen dan 0,232 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kedua komoditas tersebut mampu terserap ke dalam pasar domestik. Hal ini memberikan gambaran bahwa pasar domestik merespon positif kebijakan pemerintah dalam mengenakan pajak ekspor kakao dan kayu. Akibatnya, dengan meningkatkan output domestik kedua komoditas tersebut akan mendorong pertumbuhan positif pada industri makanan dan industri bambu, kayu, dan rotan. Kenaikan output domestik sektor kakao diiringi oleh penurunan output pada sektor perkebunan lainnya yang disebabkan oleh terjadinya kompetisi penggunaan input, terutama lahan dan tenaga kerja.

Temuan lain dari kebijakan SIM1 yang menarik untuk disimak adalah pengenaan pajak ekspor terhadap industri CPO akan menurunkan output domestik pada sektor hulunya, yaitu sektor kelapa sawit (TBS). Hal ini mencerminkan bahwa pengusaha CPO akan menekan harga kelapa sawit (TBS) yang dihasilkan petani sehingga output domestik kelapa sawit dalam bentuk TBS menurun. Hasil analisis ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Sugema, *et al* (2007) yang menjelaskan bahwa pengenaan pajak ekspor akan berakibat pada lemahnya kemampuan pelaku ekonomi di sektor hulu untuk melakukan integrasi vertikal ke hilir. Hasil riset Purba (2012) juga menunjukkan hasil yang sama, dimana pengenaan pajak ekspor akan menurunkan daya saing ekspor Indonesia dan berdampak negatif bagi produsen, karena petani menerima harga yang lebih rendah sehingga menurunkan luas areal produktif serta penurunan produksi sektor hulu industri CPO.

Pada SIM2, kebijakan peningkatan produktivitas sektor hulu industri agro yang menyertai kebijakan pajak ekspor diharapkan mampu mengkompensasi dampak negatif dari kebijakan pajak ekspor tersebut, sehingga tidak memberatkan pelaku usaha di sektor tersebut. Hasil simulasi menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan positif terhadap output domestik pada sektor yang dikenai pajak, yaitu sektor kakao, sektor kayu, dan CPO dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 11,540 persen, dan 0,596 persen, dan 2,685 persen. Kebijakan pada SIM2 dapat mendorong pertumbuhan output domestik industri agro yang lebih besar dibandingkan dengan SIM1. Artinya, kebijakan pajak ekspor yang disertai oleh peningkatan produktivitas sektor hulu mampu mengakselerasi pertumbuhan industri agro. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan pertumbuhan sektor pertanian.

Simulasi ketiga (SIM3) adalah SIM2 yang disertai peningkatan produktivitas sektor hilir. Secara teoritis, perubahan produktivitas akan diikuti oleh perubahan produksi pada industri itu sendiri dan sektor lainnya yang terkait. Hal ini berarti terjadi pergeseran kurva penawaran ke kanan, sebagai akibat adanya peningkatan produktivitas. Bila dilihat dari output domestik sektoral, SIM3 memberikan dampak positif terhadap kinerja sektor hulu dan hilir industri agro. Besaran peningkatan output di sektor hulu khususnya sektor yang dikenai pajak, yakni sektor kakao, kayu, dan CPO masing-masing sebesar 11,364 persen, 0,806 persen, dan 3,102 persen. Peningkatan produktivitas sektor hilir industri agro meningkatkan output domestik pada sektor tersebut.

4.3. Dampak terhadap Pendapatan Rumah Tangga

Dampak kebijakan pajak ekspor komoditas ekspor utama terhadap tingkat pendapatan rumah tangga berguna untuk mengetahui kelompok rumah tangga mana saja yang memperoleh dampak positif atau negatif kebijakan tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4. Kebijakan pada SIM1 berdampak positif pada kelompok rumah tangga tertentu terutama rumah tangga perkotaan golongan atas dan rumah tangga perdesaan golongan atas. Sebaliknya, penurunan pendapatan dialami oleh kelompok rumah tangga buruh pertanian, rumah tangga pengusaha pertanian, rumah tangga perdesaan bukan angkatan kerja, dan rumah tangga perkotaan golongan rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan SIM1 memperburuk distribusi pendapatan rumah tangga, dimana kelompok rumah tangga golongan atas di perdesaan dan perkotaan mengalami peningkatan pendapatan riil, sedangkan kelompok rumah tangga pertanian, dan rumah tangga perdesaan bukan angkatan kerja, serta rumah tangga perkotaan golongan bawah mengalami penurunan.

Penerapan pajak ekspor menyebabkan kerugian yang ditanggung oleh pengusaha akan dibebankan kepada produsen (rumah tangga pengusaha pertanian) dan konsumen. Salah satu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengenaan pajak ekspor terhadap industri kelapa sawit (CPO) menyebabkan pengusaha menekan harga tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan petani sehingga output domestik kelapa sawit dalam bentuk TBS menurun. Jadi secara implisit, TBS juga terkena pungutan ekspor. Hasil penelitian ini diperkuat oleh riset yang dilakukan oleh Sugema, *et al.* (2007) yang menjelaskan bahwa turunnya harga minyak sawit domestik akibat adanya pajak ekspor yang merugikan produsen (petani) kelapa sawit dan di lain pihak menguntungkan pelaku di industri hilir.

Tabel 4.

Dampak kebijakan terhadap pendapatan rumah tangga (perubahan persentase)

| Rumah tangga | SIM1 | SIM2 | SIM3 |
|---|--------|--------|--------|
| Buruh pertanian | -2,211 | -2,165 | -2,437 |
| Pengusaha pertanian | -1,287 | -1,129 | -1,173 |
| Pengusaha bebas golongan rendah perdesaan | 0,02 | 0,301 | 0,581 |
| Bukan angkatan kerja perdesaan | -1,032 | -0,851 | -0,842 |
| Pengusaha bebas golongan atas perdesaan | 0,343 | 0,704 | 1,064 |
| Pengusaha bebas golongan rendah perkotaan | -0,945 | -0,721 | -0,656 |
| Bukan angkatan kerja perkotaan | 0,005 | 0,289 | 0,546 |
| Pengusaha bebas golongan atas perkotaan | 0,567 | 0,962 | 1,386 |

Hasil simulasi pada SIM2 dan SIM3 memperlihatkan hal serupa, yaitu kebijakan pada kedua simulasi tersebut berdampak negatif terhadap pola distribusi pendapatan kelompok rumah tangga. Ketiga simulasi

menurunkan pendapatan rumah tangga pertanian, dan rumah tangga berpenghasilan rendah non pertanian baik di desa maupun di kota. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas sektor hulu dan hilir industri agro belum mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga petani akibat pengenaan pajak ekspor. Rumah tangga pertanian memperoleh dampak negatif terbesar dari kebijakan pajak ekspor.

Rumah tangga pertanian dalam penelitian ini merupakan rumah tangga yang memiliki luasan lahan yang kecil (pengusaha pertanian) termasuk yang tidak memiliki lahan (buruh). Secara total perkebunan rakyat (PR) yang dimiliki oleh rumah tangga pertanian mencapai 80 persen dari luas perkebunan nasional. Dua puluh persen sisanya dimiliki oleh perkebunan besar swasta (PBS) dan perkebunan besar nasional (PBN), dimana masing-masing sebesar 14 persen dan 6 persen. Berdasarkan sektoral, sekitar 94 persen perkebunan kakao nasional merupakan milik rakyat. Namun, dampak penurunan pendapatan terhadap petani kakao relatif kecil, karena walaupun dikenakan pajak ekspor, output kakao untuk pasar domestik meningkat. Sebaliknya, pengenaan pajak ekspor pada industri CPO tidak mampu meningkatkan output CPO domestik, dan menurunkan output sektor hulunya sehingga merugikan petani sawit. Akibatnya rumah tangga petani sawit mengalami penurunan pendapatan. Persentase luas areal dan produksi sawit milik rakyat menurun sepanjang tahun 2008-2011, begitu pula dengan perkebunan besar negara. Sementara itu, persentase luas areal dan produksi sawit oleh PBS terus meningkat setiap tahunnya terhadap total lahan sawit nasional. Data ini semakin memperkuat temuan penelitian ini bahwa walaupun diberlakukannya pajak ekspor pada CPO, pengusaha CPO dapat membebarkannya kepada petani sawit, sehingga petani sawit merugi dan secara relatif perlahan-lahan penguasaan lahan dan produksi sawit oleh PBS meningkat dan PR dan PBN menurun (Ditjendun, 2011).

Penurunan luas areal dan produksi perkebunan sawit milik rakyat mengakibatkan produktivitas kelapa sawit menjadi rendah. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar penghasil minyak sawit, tetapi produktivitas sawit Indonesia masih kalah dibandingkan Malaysia. Rata-rata produktivitas perkebunan sawit nasional sekitar 3,52 ton CPO/ha, sedangkan Malaysia sebesar 4,8 ton CPO/ha. Hal ini disebabkan utamanya oleh produktivitas perkebunan kelapa sawit milik rakyat masih rendah. Produktivitas perkebunan rakyat masih dibawah 3 ton CPO/ha. Sebaliknya produktivitas PBS menunjukkan performa yang tinggi dimana produktivitas kelapa sawit swasta mencapai enam ton CPO/ha. Hal ini menjelaskan mengapa pada SIM2 dan SIM3 pendapatan rumah tangga pertanian masih mengalami penurunan.

5. PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:

kebijakan pajak ekspor berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB riil). Bila keberhasilan ekonomi nasional hanya dinilai berdasarkan indikator makroekonomi, maka kebijakan tersebut dinilai tidak pro terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan memperburuk daya saing ekspor. Sebaliknya, apabila kebijakan ekspor tersebut disertai oleh peningkatan produktivitas sektor hulu maka akan berdampak positif terhadap PDB riil. Peningkatan PDB riil akan semakin tinggi bila kebijakan pajak ekspor dan peningkatan produktivitas sektor hulu disertai oleh peningkatan produktivitas pada sektor hilirnya.

Kebijakan pajak ekspor dapat menghambat pertumbuhan ekspor pada sektor yang dikenai pajak dengan atau tanpa peningkatan produktivitas sektor hulu dan hilir berbasis agro industri. Penurunan ekspor tersebut mendorong peningkatan output domestik pada subsektor industri agro tertentu saja. Tetapi bila diikuti oleh

peningkatan produktivitas sektor hulu dan hilir berbasis agro akan meningkatkan output domestik pada setiap subsektor industri agro dan pertanian.

Apabila kebijakan pajak ekspor disertai ataupun tidak oleh peningkatan produktivitas sektor hulu dan hilir maka akan meningkatkan pendapatan pada rumah tangga non pertanian berpenghasilan tinggi, dan penurunan pendapatan pada kelompok rumah tangga pertanian. Kebijakan tersebut semakin memperburuk distribusi pendapatan dan kesejahteraan antar kelompok rumah tangga.

5.1. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, implikasi kebijakan yang dapat disarankan, adalah: (1) Realisasi rencana strategis Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian terkait peningkatan produktivitas sektor hulu dan hilir industri agro menjadi syarat perlu dalam melakukan hilirisasi industri agro. Dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk mendorong peningkatan produktivitas, baik peningkatan produktivitas tenaga kerja (melalui peningkatan keahlian dan ketrampilan) maupun peningkatan efisiensi penggunaan berbagai masukan material dan peralatan modal, peningkatan kegiatan riset, dan pengembangan teknologi. Pengembangan industri agro yang hanya bergantung pada kebijakan ekspor merupakan keputusan yang keliru baik secara ekonomi makro, sektoral, maupun distribusi pendapatan. (2) Pemerintah perlu membuat suatu strategi untuk mengkompensasi penurunan pendapatan rumah tangga pertanian melalui redistribusi penerimaan pajak ekspor, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Ghana. Skema redistribusi penerimaan pajak ekspor dapat melalui skim kredit murah untuk petani. Pembayaran kredit dilakukan berdasarkan pola pendapatan petani. (3) Pemerintah hendaknya membantu rumah tangga pertanian dalam meningkatkan produktivitasnya melalui peremajaan kembali tanaman yang telah tua, penggunaan bibit unggul, perawatan, pemupukan, dan pemeliharaan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik., 2012. *Pendapatan Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Dumairy, 1996. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga, Jakarta.
- Halwani, R.H., 2002. *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Haryono, D., 2008. *Dampak industrialisasi pertanian terhadap kinerja sektor pertanian dan kemiskinan perdesaan di Indonesia*. [Disertasi]. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Hasibuan, N., 1993. *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli dan Regulasi*. LP3ES. Jakarta.
- Helpman, E. and Krugman, P.R., 1985. *Market Structure and Foreign Trade*. MIT Press. Cambridge.
- Horridge, M., 2001. *Minimal: A Simplified General Equilibrium Model*. Australia: Centre of Policy Studies and Impact Project. Monash University. Melbourne.
- Horridge, M., Parmenter, B.R., Pearson, K.R., 1993. ORANI-F: A General Equilibrium Model of the Australian Economy. *Economic and Financial Computing*, 3, pp.71-140.
- Kementerian Kehutanan. 2010. *Rencana Strategis Kementertian Kehutanan Tahun 2010-2014*. Kementerian Kehutanan. [online] Available at <www.dephut.go.id/files/Renstra_2010_2014.pdf> [Accessed 1 August 2012].

- Kementerian Keuangan. 2013. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 564/KM.4/2013 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Perhitungan Bea Keluar*. Kementerian Keuangan. [online] Available at <<http://repository.beacukai.go.id/peraturan/2013/03/7f394e9a673b2584bb9d17da739021b1-kmk-564-kmk04-2013-hpe-april-2013.pdf>> [Accessed 1 April 2013].
- _____. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.OI/2012*. Kementerian Keuangan. [online] Available at <<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/75~PMK.011~2012Per.HTM>> [Accessed 1 August 2012].
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2011. *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. [online] Available at <[http://www.depkeu.go.id/ind/others/bakohumas/bakohumaskemenko/MP3EI_revisi-complete_\(20mei11\).pdf](http://www.depkeu.go.id/ind/others/bakohumas/bakohumaskemenko/MP3EI_revisi-complete_(20mei11).pdf)> [Accessed 1 August 2012].
- Kementerian Perindustrian. 2011. *Outlook Industri 2012: Strategi Percepatan dan Perluasan Agroindustri*. Kementerian Perindustrian. [online] Available at <<http://kemenperin.go.id/download/343>>. [Accessed 1 August 2012].
- _____. 2009. *Roadmap Industri Pengolahan CPO*. Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia. Kementerian Perindustrian. [online] Available at <http://agro.kemenperin.go.id/e-klaster/file/roadmap/KICSUMUT_1.pdf> [Accessed, 1 August 2012].
- Kementerian Pertanian. 2013. *Ekspor Impor Komoditi Pertanian Per Subsektor 2012*. Kementerian Pertanian. [online] Available at <<http://aplikasi.deptan.go.id/eksim2012/hasilNeraca.asp>> [Accessed 5 April 2013].
- _____. 2013. *Percepatan Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Perkebunan Berkelanjutan 2013*. [online] Available at <www.deptan.go.id/eplanning/admin/laporan/Tayangan_PERKEBUNAN.pdf> [Accessed 1 April 2013].
- _____. 2010. *Rencana Strategis Kementertian Pertanian Tahun 2010-2014*. Kementerian Pertanian. [online] Available at <<http://www.deptan.go.id/renstra2010-2014/renstra-kementan-2010-2014.pdf>> [Accessed 1 August 2012].
- Krugman, P.R., and Obstfeld, M., 2002. *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan*. Basri [penerjemah]. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Munadi, E., 2007. Penurunan Pajak Ekspor dan Dampaknya terhadap Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Ke India (Pendekatan Error Correction Model). *Informatika Pertanian*, 16 (2).
- Nopirin, 1997. *Ekonomi Internasional*. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Oktaviani, R., 2000. The Impact of APEC Trade Liberalisation on Indonesian Economy and Its Agricultural Sector. [Ph.D Thesis]. The Sydney University. Sydney.
- Salvatore, D., 1997. *Ekonomi Internasional*. Munandar [penerjemah]. Erlangga, Jakarta.
- Sugema, I., Hasan, M.F., Aviliani, U., Hidayat, dan Sugiyono. 2007. *Strategi Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit*. INDEF. Jakarta.
- Tambunan, .T.H., 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Wachjudi, 2010. *Hilirisasi Industri Agro: Dapat Mengatasi Ancaman Deindustrialisasi*. Majalah Kina (Karya Indonesia, Edisi 3). Kementerian Perindustrian. Jakarta.
- Wittwer, G. 1999. WAYANG 2: A General Equilibrium Model Adapted for the Indonesian Economy. *CIES Working Paper*.